



PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412

MEDAN-20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	3,276,344,285,159.73	
b. Belanja	Rp.	3,224,449,048,408.88	
Surplus	Rp		51,895,236,750.85
c. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp.	33,838,947,039.68	
Pengeluaran	Rp.	12,701,122,846.29	
Pembiayaan Netto	Rp		21,137,824,193.39
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp		73,033,060,944.24

Pasal 3

Uraian laporan realisi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp 830.556.177.217,59), dengan rincian sebagai berikut:			
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	4,106,900,462,377.32	
2. Realisasi	Rp.	3,276,344,285,159.73	
Selisih (Kurang)	Rp.		(830,556,177,217.59)
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp 1.013.111.590.482.12), dengan rincian sebagai berikut:			
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	4,237,560,638,891.00	
b. Realisasi	Rp.	3,224,449,048,408.88	
Selisih (Kurang)	Rp.		(1,013,111,590,482.12)
c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp 182.555.413.264,53, dengan rincian sebagai berikut:			
a. Defisit setelah perubahan	Rp.	(130,660,176,513.68)	
b. Realisasi	Rp.	51,895,236,750.85	
Selisih Lebih	Rp.		182,555,413,264.53
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp 112.654.488.895,00) dengan rincian sebagai berikut:			
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	146,493,435,934.68	
b. Realisasi	Rp.	33,838,947,039.68	
Selisih (Kurang)	Rp.		(112,654,488,895.00)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp 3.132.136.574,71), dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	15,833,259,421.00
b. Realisasi	Rp.	12,701,122,846.29
Selisih (Kurang)	Rp.	(3,132,136,574.71)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp 109.522.352.320,29), dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	130,660,176,513.68
b. Realisasi	Rp.	21,137,824,193.39
Selisih (Kurang)	Rp.	(109,522,352,320.29)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	24,793,716,376,864.60
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	328,953,188,447.14
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	24,464,763,188,417.50

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut:

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2013	Rp.	22,508,243,801.68
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	682,698,195,535.85
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp.	(630,802,958,785.00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(1,367,122,846.29)
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran	Rp.	(3,296,762.00)
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	160,435,489.48
g. Pendapatan yang ditangguhkan (Kas di Bend. Swakelola)	Rp.	95,498,586.00
h. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2013	Rp.	73,288,995,019.72

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
 - 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
- e. Lampiran V : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2013 akan dijabarkan lebihlanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2014

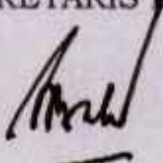
WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 6



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran 1.1
Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor
Tahun 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
4	PENDAPATAN				
4.1	Urusan Wajib	4.106.900.462.377,32	3.276.344.285.159,73	(830.556.177.217,59)	79,78
4.1.02	Kesehatan	4.106.335.962.377,32	3.276.117.229.899,73	(830.218.732.477,59)	79,78
4.1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	144.827.470.000,00	110.280.524.952,59	(34.546.945.047,41)	76,15
4.1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pingadi	1.327.470.000,00	753.856.225,00	(573.613.775,00)	56,79
4.1.03	Pekerjaan Umum	143.500.000.000,00	109.526.668.727,59	(33.973.331.272,41)	76,33
4.1.03.1.03.01	Dinas Bina Marga	631.215.000,00	517.203.300,00	(114.011.700,00)	81,94
4.1.04	Perumahan	631.215.000,00	517.203.300,00	(114.011.700,00)	81,94
4.1.04.1.04.01	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.900.000.000,00	1.817.602.762,00	(82.397.238,00)	95,66
4.1.04.1.04.02	Dinas Pencegah Pemadani Kebakaran	500.000.000,00	417.083.812,00	(82.916.188,00)	83,42
4.1.05	Penataan Ruang	1.400.000.000,00	1.400.518.950,00	518.950,00	100,04
4.1.05.1.05.01	Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan	122.500.000.000,00	118.154.379.167,00	(4.345.620.833,00)	96,45
4.1.07	Perhubungan	122.500.000.000,00	118.154.379.167,00	(4.345.620.833,00)	96,45
4.1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan	30.100.000.000,00	22.144.441.300,00	(7.955.558.700,00)	73,57
4.1.08	Lingkungan Hidup	30.100.000.000,00	22.144.441.300,00	(7.955.558.700,00)	73,57
4.1.08.1.08.02	Dinas Pertamanan	26.190.200.000,00	22.743.306.638,00	(3.446.893.362,00)	86,84
4.1.08.1.08.03	Dinas Kebersihan	5.189.900.000,00	4.608.578.356,00	(581.321.644,00)	88,80
4.1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	21.000.300.000,00	18.134.728.282,00	(2.865.571.718,00)	86,35
4.1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	900.000.000,00	1.112.867.500,00	212.867.500,00	123,65
4.1.16	Penanaman Modal	900.000.000,00	1.112.867.500,00	212.867.500,00	123,65
4.1.16.1.16.02	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	15.258.500.000,00	16.112.414.654,00	853.914.654,00	105,60
4.1.17	Kebudayaan	15.258.500.000,00	16.112.414.654,00	853.914.654,00	105,60
4.1.17.1.17.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000.000,00	288.008.866,50	(211.991.133,50)	57,60
4.1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat	500.000.000,00	288.008.866,50	(211.991.133,50)	57,60
4.1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	3.763.528.577.377,32	2.982.946.480.759,64	(780.582.096.617,68)	79,26
4.1.20.1.20.05	Dinas Pendapatan	5.000.000.000,00	4.588.659.454,00	(411.340.546,00)	91,77
4.1.20.1.20.09	Badan Pengelola Keuangan Daerah	1.197.019.279.770,00	883.154.897.701,82	(313.864.382.068,18)	73,78
		2.561.509.297.607,32	2.095.202.923.603,82	(466.306.374.003,50)	81,80

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
6.1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
6.1.22.1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat				
6.1.22.1.22.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.631.267.527,00	4.631.267.527,00	0,00
6.1.22.1.22.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	4.631.267.527,00	4.631.267.527,00	0,00
6.1.24	Kearsipan				
6.1.24.1.24.01	Kantor Arsip				
6.1.24.1.24.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	2.778.355.157,00	2.778.355.157,00	0,00
6.1.24.1.24.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	2.778.355.157,00	2.778.355.157,00	0,00
6.1.25	Komunikasi dan Informatika				
6.1.25.1.25.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				
6.1.25.1.25.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	12.314.910.996,00	12.314.910.996,00	0,00
6.1.25.1.25.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	12.314.910.996,00	12.314.910.996,00	0,00
6.1.26	Perpustakaan				
6.1.26.1.26.01	Kantor Perpustakaan				
6.1.26.1.26.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	4.752.215.044,00	4.752.215.044,00	0,00
6.1.26.1.26.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	4.752.215.044,00	4.752.215.044,00	0,00
6.2	Urusan Pilihan				
6.2.01	Pertanian				
6.2.01.2.01.01	Dinas Pertanian dan Kelautan				
6.2.01.2.01.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	17.687.486.896,00	17.687.486.896,00	0,00
6.2.01.2.01.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	17.687.486.896,00	17.687.486.896,00	0,00
6.2.07	Industri				
6.2.07.2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
6.2.07.2.07.01.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	21.225.105.976,00	21.225.105.976,00	0,00
6.2.07.2.07.01.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	21.225.105.976,00	21.225.105.976,00	0,00

WALIKOTA MEDAN,

td

DZULMI ELDIN S.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
1	2	3	4	5	6
PELAYANAN UMUM					
01	06	985.543.131.420,00	741.402.029.023,65	(244.141.102.396,35)	75,23
01	20	38.890.916.041,00	23.455.652.253,00	(15.435.263.788,00)	60,31
01	20	924.558.685.379,00	701.098.236.617,65	(223.460.448.761,35)	75,83
01	24	3.729.100.000,00	3.026.914.157,00	(702.185.843,00)	81,17
01	25	18.364.430.000,00	13.821.225.996,00	(4.543.204.004,00)	75,26
KETERIBAN DAN KEAMANAN					
03	19	45.149.123.592,00	28.037.835.355,00	(17.111.288.237,00)	62,10
03	19	45.149.123.592,00	28.037.835.355,00	(17.111.288.237,00)	62,10
EKONOMI					
04	07	253.985.434.000,00	177.057.723.525,70	(76.927.710.474,30)	69,71
04	14	136.467.263.000,00	95.639.984.749,70	(40.827.278.250,30)	70,08
04	14	15.293.140.000,00	10.607.186.891,00	(4.685.953.109,00)	69,36
04	15	11.365.028.000,00	6.549.130.031,00	(4.815.897.969,00)	57,63
04	16	19.647.248.000,00	11.639.731.084,00	(8.007.516.916,00)	59,24
04	21	8.932.984.000,00	7.065.025.511,00	(1.867.958.489,00)	79,09
04	22	8.737.940.000,00	4.824.827.527,00	(3.913.112.473,00)	55,22
04	01	14.752.182.000,00	11.621.823.956,00	(3.130.358.044,00)	78,78
04	03	277.130.000,00	157.059.400,00	(120.070.600,00)	56,67
04	05	9.464.635.000,00	6.242.018.200,00	(3.222.616.800,00)	65,95
04	06	15.065.384.400,00	11.782.216.400,00	(3.283.168.000,00)	78,21
04	07	13.982.499.600,00	10.928.719.776,00	(3.053.779.824,00)	78,16
LINGKUNGAN HIDUP					
05	05	373.167.382.500,00	238.941.625.260,00	(134.225.757.240,00)	64,03
05	08	67.354.722.250,00	20.665.121.924,00	(46.689.600.326,00)	30,68
05	08	305.812.660.250,00	218.276.503.336,00	(87.536.156.914,00)	71,38
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06	03	692.427.077.400,00	497.728.458.038,95	(194.698.619.361,05)	71,88
06	04	409.285.661.000,00	319.500.627.725,95	(89.785.033.274,05)	78,06
06	04	283.141.416.400,00	178.227.830.313,00	(104.913.586.087,00)	62,95

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	(Rp)	(%)	
		3	4	5	6		
07	KESEHATAN Kesehatan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	573.111.395.000,00	389.133.311.196,48	(183.978.083.803,52)	67,90		
07		1	02	546.552.206.000,00	369.020.008.213,48	(177.532.197.786,52)	67,52
07		1	12	26.559.189.000,00	20.113.302.983,00	(6.445.886.017,00)	75,73
08	PARIWISATA DAN BUDAYA Kebudayaan Pariwisata	32.202.767.000,00	22.780.869.627,10	(9.421.897.372,90)	70,74		
08		1	17	23.007.610.000,00	16.271.365.177,10	(6.736.244.822,90)	70,72
08		2	04	9.195.157.000,00	6.509.504.450,00	(2.685.652.550,00)	70,79
10	PENDIDIKAN Pendidikan Kepernuadaan dan Olah Raga Perpustakaan	1.245.208.126.992,00	1.109.133.107.469,00	(136.075.019.523,00)	89,07		
10		1	01	1.226.920.051.592,00	1.097.580.293.033,00	(129.339.758.559,00)	89,46
10		1	18	13.043.406.400,00	7.095.397.247,00	(5.948.009.153,00)	54,40
10		1	26	5.244.669.000,00	4.457.417.189,00	(787.251.811,00)	84,99
11	PERLINDUNGAN SOSIAL Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial	36.766.200.987,00	20.234.088.913,00	(16.532.112.074,00)	55,03		
11		1	10	27.482.817.500,00	16.324.269.667,00	(11.158.547.833,00)	59,40
11		1	11	682.000.000,00	126.520.000,00	(555.480.000,00)	18,55
11		1	13	8.601.383.487,00	3.783.299.246,00	(4.818.084.241,00)	43,98
JUMLAH		4.237.560.638.891,00	3.224.449.048.408,88	(1.013.111.590.482,12)	76,09		

WALIKOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2013

Lampiran I
Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor Tahun 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	4.106.900.462.377,32	3.276.344.285.159,73	(830.556.177.217,59)	79,78
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.147,73	(372.078.110.576,59)	76,42
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.189.999.279.770,00	881.346.719.012,01	(308.652.560.757,99)	74,06
1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	204.871.885.000,00	188.459.795.126,50	(16.412.089.873,50)	91,99
1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.957.540.954,00	9.503.605.764,00	546.064.810,00	106,10
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.419.114.000,32	126.859.589.245,22	(47.559.524.755,10)	72,73
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.517.923.842.653,00	2.060.845.776.012,00	(457.078.066.641,00)	81,85
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.538.855.917.643,00	1.506.316.349.586,00	(32.539.568.057,00)	97,89
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	193.008.107.149,00	172.440.053.470,00	(20.568.053.679,00)	89,34
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.326.506.494,00	1.614.584.116,00	288.077.622,00	121,72
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.270.244.794.000,00	1.270.244.794.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	74.276.510.000,00	62.016.918.000,00	(12.259.592.000,00)	83,49
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	376.753.061.192,00	363.758.805.000,00	(12.994.256.192,00)	96,55
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	376.753.061.192,00	363.758.805.000,00	(12.994.256.192,00)	96,55
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	602.314.863.818,00	190.770.621.426,00	(411.544.242.392,00)	31,67
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	602.064.675.770,00	190.770.621.426,00	(411.294.054.344,00)	31,69
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	250.188.048,00	0,00	(250.188.048,00)	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10.728.800.000,00	9.328.800.000,00	(1.400.000.000,00)	86,95
1.3.3	Pendapatan Lainnya	10.728.800.000,00	9.328.800.000,00	(1.400.000.000,00)	86,95
2	BELANJA	4.237.560.638.891,00	3.224.449.048.408,88	(1.013.111.590.482,12)	76,09
2.1	BELANJA OPERASI	3.202.546.141.941,00	2.593.084.833.763,88	(609.461.308.177,12)	80,97
2.1.1	Belanja Pegawai	2.219.729.975.379,00	1.912.221.528.149,00	(307.508.447.230,00)	86,15
2.1.2	Belanja Barang	896.976.406.462,00	644.025.941.486,33	(252.950.464.975,67)	71,80
2.1.3	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	4.993.144.103,55	(4.006.855.896,45)	55,48
2.1.5	Belanja Hibah	69.514.920.450,00	29.935.455.125,00	(39.579.465.325,00)	43,06
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.158.172.650,00	742.500.000,00	(5.415.672.650,00)	12,06
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.166.667.000,00	1.166.264.900,00	(402.100,00)	99,97

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2	BELANJA MODAL	1.028.014.496.950,00	630.802.958.785,00	(397.211.538.165,00)	61,36
2.2.1	Belanja Tanah	48.917.363.384,00	8.494.139.667,00	(40.423.223.717,00)	17,36
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	212.166.109.120,00	99.416.886.349,00	(112.749.222.771,00)	46,86
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	349.993.450.583,00	207.509.235.619,00	(142.484.214.964,00)	59,29
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	411.226.981.468,00	312.285.027.580,00	(98.941.953.888,00)	75,94
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.710.592.395,00	3.097.669.570,00	(2.612.922.825,00)	54,24
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.000.000.000,00	561.255.860,00	(6.438.744.140,00)	8,02
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	561.255.860,00	(6.438.744.140,00)	8,02
SURPLUS / (DEFISIT)		(130.660.176.513,68)	51.895.236.750,85	182.555.413.264,53	(39,72)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	146.493.435.934,68	33.838.947.039,68	(112.654.488.895,00)	23,10
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	12.493.435.934,68	22.504.947.039,68	10.011.511.105,00	180,13
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	134.000.000.000,00	11.334.000.000,00	(122.666.000.000,00)	8,46
3.2	PENGELUARAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.833.259.421,00	12.701.122.846,29	(3.132.136.574,71)	80,22
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.679.259.421,00	0,00	(1.679.259.421,00)	0,00
		14.154.000.000,00	12.701.122.846,29	(1.452.877.153,71)	89,74
PEMBIAYAAN NETTO		130.660.176.513,68	21.137.824.193,39	(109.522.352.320,29)	16,18
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0,00	73.033.060.944,24	73.033.060.944,24	0,00
WALIKOTA MEDAN, titd DZULMI ELDIN S.					

LAMPIRAN 1 PERIDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Halaman 2

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR TAHUN 2014

 PEMERINTAH KOTA MEDAN NERACA Per 31 December 2013 dan 2012		
URAIAN	2013	2012
ASET		
ASET LANCAR	1,395,423,486,325.29	1,140,960,171,355.67
Kas	73,288,995,019.72	25,062,069,653.68
Kas di kas daerah	59,008,116,575.13	12,493,435,934.68
Bank sumut ac 000703-0	14,454,326,779.93	4,214,040,189.13
Bank sumut ac 19344-0	44,539,241,658.01	4,812,422,928.76
Bank sumut ac. 18295-0	14,041,718.70	1,554,231,397.00
Bank sumut ac. 22386-6	506,418.49	1,912,741,419.79
Kas di Bend. Pengeluaran SKPD	-	-
Kas di Bend. Penerimaan SKPD	255,934,075.48	2,075,419,021.00
Kas di Bendahara BLUD RSU Pirngadi	12,711,215,458.89	8,994,960,907.30
Kas di Bendahara Swakelola BLUD RSU Pirngadi	1,313,728,910.22	1,102,724,484.70
Kas Lainnya di Bend. Pengeluaran SKPD	-	23,255,540.00
Kas Lainnya di Bend. BLUD RSU Pirngadi	-	372,273,766.00
Piutang	1,274,386,378,590.72	1,056,666,841,162.32
Piutang Pajak daerah	300,948,870,595.22	478,480,611,224.28
Piutang Retribusi Daerah	37,964,200,997.32	11,939,735,995.58
Piutang PAD Lainnya (Deviden PD Pasar)	405,743,699.50	72,052,380.00
Piutang dana bagi hasil pusat	-	102,505,740.00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi	930,393,776,327.23	562,280,905,904.94
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	68,308,000.00	184,072,000.00
Beban dibayar di muka	363,613,295.45	336,295,151.52
Piutang Lain-lain	4,241,865,676.00	3,270,662,766.00
Persediaan	47,748,112,714.85	59,231,260,539.67
INVESTASI JANGKA PANJANG	275,239,965,460.00	282,416,914,131.53
Investasi Non Permanen		
Dana Bergulir	1,680,036,374.00	2,911,000,000.00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	273,559,929,086.00	279,505,914,131.53
ASET TETAP	22,995,114,963,711.50	22,610,244,670,381.10
Tanah	18,587,731,635,649.00	18,661,444,455,037.00
Peralatan dan Mesin	837,290,920,429.72	760,368,681,120.04
Gedung dan Bangunan	1,037,594,572,181.05	911,949,523,803.20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,712,983,043,505.37	2,429,960,639,975.07
Aset Tetap Lainnya	54,751,557,362.38	48,686,939,412.47
Konstruksi dalam Pengerjaan	44,634,076,501.67	52,331,131,548.70
Akumulasi Penyusutan	(279,870,841,917.74)	(254,496,700,515.37)
ASET LAINNYA	127,937,961,367.87	99,006,818,674.57
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	26,730,618,522.91	26,730,618,522.91
Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	20,260,110,901.50	17,029,826,846.50
Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran	390,000,000.00	390,000,000.00
Aset Lain-lain	80,557,231,943.46	54,856,373,305.16
JUMLAH ASET	24,793,716,376,864.60	24,132,628,574,542.90

URAIAN	2013	2012
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	229,931,807,369.28	326,502,942,884.71
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	395,529,306.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	22,531,284,350.15	19,834,606,628.06
Pendapatan Diterima Dimuka	2,385,490,735.87	80,833,333.33
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Belanja	171,838,796,786.00	292,547,885,793.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	33,176,235,497.26	13,644,087,824.32
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	99,021,381,077.86	106,686,689,932.50
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	97,386,319,277.86	104,234,097,232.50
Utang Jangka Panjang Lainnya	1,635,061,800.00	2,452,592,700.00
JUMLAH KEWAJIBAN	328,953,188,447.14	433,189,632,817.21
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR	1,165,491,678,956.01	814,457,228,470.96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	73,033,060,944.24	22,508,243,801.68
Cadangan untuk Piutang	1,274,386,378,590.72	1,056,666,841,162.32
Cadangan untuk Persediaan	47,748,112,714.85	59,231,260,539.67
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(229,931,807,369.28)	(326,107,413,578.71)
Pendapatan yang Ditangguhkan	255,934,075.48	2,158,296,546.00
BLUD RSU Pirmadi	95,498,586.00	82,877,525.00
Dinas Pendapatan	-	2,075,419,021.00
Dinas Perindustrian Perdagangan/Dana Bergulir	160,435,489.48	
EKUITAS DANA INVESTASI	23,299,271,509,461.50	22,884,981,713,254.70
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	275,239,965,460.00	282,416,914,131.53
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	22,995,114,963,711.50	22,610,244,670,381.10
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	127,937,961,367.87	99,006,818,674.57
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	(99,021,381,077.86)	(106,686,689,932.50)
EKUITAS DANA CADANGAN	-	-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA	24,464,763,188,417.50	23,699,438,941,725.70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	24,793,716,376,864.60	24,132,628,574,542.90

WALIKOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S.

 PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2013 dan 2012		
URAIAN	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	881,346,719,012.01	892,674,245,233.74
Hasil Retribusi Daerah	188,459,795,126.50	127,839,652,517.53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,503,605,764.00	9,780,305,586.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126,859,589,245.22	117,607,258,270.11
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	174,054,637,586.00	197,098,179,192.00
Dana Alokasi Umum	1,270,244,794,000.00	1,153,789,320,000.00
Dana Alokasi Khusus	62,016,918,000.00	66,298,270,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	190,770,621,426.00	154,099,451,676.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	363,758,805,000.00	251,397,130,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah	9,328,800,000.00	27,620,100,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	3,276,344,285,159.73	2,998,203,912,475.38
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	1,912,221,528,149.00	1,743,320,808,689.00
Belanja Bunga	4,993,144,103.55	3,340,622,868.18
Belanja Hibah	29,935,455,125.00	38,779,945,450.00
Belanja Bantuan Sosial	742,500,000.00	14,684,300,000.00
Belanja Tidak Terduga	561,255,860.00	75,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan	1,166,264,900.00	1,166,264,900.00
Belanja Barang dan Jasa	644,025,941,486.33	661,376,711,350.49
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	2,593,646,089,623.88	2,462,743,653,257.67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	682,698,195,535.85	535,460,259,217.71
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Modal Pengadaan Tanah	8,494,139,667.00	22,039,829,012.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	4,465,190,000.00	22,818,422,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	6,016,155,000.00	17,760,917,526.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak	930,480,000.00	1,350,323,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air	39,700,000.00	2,864,194,800.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	733,066,760.00	398,973,500.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan	1,469,976,000.00	1,392,144,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	9,278,482,648.00	10,707,703,350.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	5,342,632,581.00	5,165,240,289.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	9,507,002,325.00	9,764,970,300.00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair	26,312,815,577.00	10,135,626,225.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	330,243,600.00	913,025,500.00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	8,639,441,200.00	9,925,675,817.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	3,100,214,100.00	1,258,333,900.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	988,472,000.00	2,508,082,500.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	512,855,000.00	2,369,513,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	11,310,212,900.00	18,562,513,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	8,280,012,658.00	2,377,157,900.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	132,838,689,200.00	126,859,453,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	8,665,309,884.00	4,619,264,250.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	140,718,810,546.00	135,484,175,550.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan	22,065,101,000.00	6,981,863,000.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	718,981,250.00	222,719,625.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	207,509,235,619.00	135,034,546,963.00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1,929,678,550.00	712,407,577.00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,	390,805,020.00	462,994,200.00
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	0.00	23,700,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	335,784,000.00	231,025,000.00
Belanja Modal Pemadam Kebakaran	1,824,150,000.00	168,520,000.00
Belanja Modal Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas	445,570,000.00	0.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	0.00	90,350,000.00

URAIAN	2013	2012
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jalan	6,832,565,700.00	1,172,664,600.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sekolah	777,186,000.00	4,052,408,400.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>630,802,958,785.00</i>	<i>558,428,737,784.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(630,802,958,785.00)	(558,428,737,784.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	11,334,000,000.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>11,334,000,000.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	19,980,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang	12,701,122,846.29	11,277,773,511.91
Pembayaran Utang Kepada Rekanan/Kontraktor	0.00	3,937,700,624.44
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>12,701,122,846.29</i>	<i>35,195,474,136.35</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(1,367,122,846.29)	(35,195,474,136.35)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	270,345,450,701.00	238,450,549,016.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	<i>270,345,450,701.00</i>	<i>238,450,549,016.00</i>
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	270,345,450,701.00	238,055,019,710.00
Koreksi SiLPA	3,296,762.00	
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	<i>270,348,747,463.00</i>	<i>238,055,019,710.00</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(3,296,762.00)	395,529,306.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	50,524,817,142.56	(57,768,423,396.64)
Saldo Awal Kas (SiLPA)	22,508,243,801.68	80,672,196,504.32
Saldo Akhir Kas	73,033,060,944.24	22,903,773,107.68
Terdiri dari :		
Kas di Kas Daerah	59,008,116,575.13	12,493,435,934.68
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
Kas di Bendahara Swadana/BLUD RSU	12,711,215,458.89	8,912,083,382.30
Kas di Bendahara Swakelola/Instalasi farmasi	1,313,728,910.22	1,102,724,484.70
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	23,255,540.00
Kas Lainnya di Bendahara Swadana/BLUD RSU	0.00	372,273,766.00
Saldo Akhir Kas (SiLPA + Utang PFK)	73,033,060,944.24	22,903,773,107.68
Kas di Bendahara Penerimaan	160,435,489.48	2,075,419,021.00
Kas di Bendahara Swakelola (pdpt yang ditanggubkan)	95,498,586.00	82,877,525.00
Saldo Akhir Kas	73,288,995,019.72	25,062,069,653.68

WALIKOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S



WALIKOTA MEDAN

KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Kota Medan telah menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah oleh Kepala Daerah sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dan PP Nomor 8 Tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala Daerah harus membuat Laporan Keuangan, setidaknya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama suatu periode.

Untuk memenuhi kewajiban Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tersebut, Pemerintah Kota Medan telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2013 sebagaimana terlampir.

Penyusunan laporan keuangan ini juga memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diberlakukan sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2005, terutama dalam klasifikasi pos-pos Neraca, Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong terciptanya transparansi dan keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian **Good Governance**.

MEDAN, Agustus 2014

WALIKOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S



WALIKOTA MEDAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013 yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
 - (b) Neraca;
 - (c) Laporan Arus Kas; dan
 - (d) Catatan Atas Laporan Keuangan,
- sebagaimana terlampir adalah Tanggung Jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

WALIKOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2013 DAN 2012

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
1	PENDAPATAN	4.106.900.462.377,32	3.276.344.285.159,73	79,78	2.998.203.912.475,38
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.578.247.819.724,32	1.206.169.709.147,73	76,42	1.147.901.461.607,38
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.189.999.279.770,00	881.346.719.012,01	74,06	892.674.245.233,74
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	204.871.885.000,00	188.459.795.126,50	91,99	127.839.652.517,53
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.957.540.954,00	9.503.605.764,00	106,10	9.780.305.586,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.419.114.000,32	126.859.589.245,22	72,73	117.607.258.270,11
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.517.923.842.653,00	2.060.845.776.012,00	81,85	1.822.682.350.868,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.538.855.917.643,00	1.506.316.349.586,00	97,89	1.417.185.769.192,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	193.008.107.149,00	172.440.053.470,00	89,34	195.909.903.297,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	1.326.506.494,00	1.614.584.116,00	121,72	1.188.275.895,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.270.244.794.000,00	1.270.244.794.000,00	100,00	1.153.789.320.000,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	74.276.510.000,00	62.016.918.000,00	83,49	66.298.270.000,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	376.753.061.192,00	363.758.805.000,00	96,55	251.397.130.000,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	376.753.061.192,00	363.758.805.000,00	96,55	251.397.130.000,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	602.314.863.818,00	190.770.621.426,00	31,67	154.099.451.676,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	602.064.675.770,00	190.770.621.426,00	31,69	154.099.451.676,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	250.188.048,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	10.728.800.000,00	9.328.800.000,00	86,95	27.620.100.000,00
1.3.3	Pendapatan lainnya	10.728.800.000,00	9.328.800.000,00	86,95	27.620.100.000,00
2	BELANJA	4.237.560.638.891,00	3.224.449.048.408,88	76,09	3.021.172.391.041,67
2.1	BELANJA OPERASI	3.202.546.141.941,00	2.593.084.833.763,88	80,97	2.462.668.653.257,67
2.1.1	Belanja Pegawai	2.219.729.975.379,00	1.912.221.528.149,00	86,15	1.743.320.808.689,00
2.1.2	Belanja Barang	896.976.406.462,00	644.025.941.486,33	71,80	661.376.711.350,49
2.1.3	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	4.993.144.103,55	55,48	3.340.622.868,18
2.1.5	Belanja Hibah	69.514.920.450,00	29.935.455.125,00	43,06	38.779.945.450,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.158.172.650,00	742.500.000,00	12,06	14.684.300.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.166.667.000,00	1.166.264.900,00	99,97	1.166.264.900,00
2.2	BELANJA MODAL	1.028.014.496.950,00	630.802.958.785,00	61,36	558.428.737.784,00
2.2.1	Belanja Tanah	48.917.363.384,00	8.494.139.667,00	17,36	22.039.829.012,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	212.166.109.120,00	99.416.886.349,00	46,86	124.815.120.007,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	349.993.450.583,00	207.509.235.619,00	59,29	135.034.546.963,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	411.226.981.468,00	312.285.027.580,00	75,94	275.340.140.025,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	(%)	REALISASI 2012
2.2.5	Belanja Ases Tetap Lainnya	5.710.592.395,00	3.097.669.570,00	54,24	1.199.101.777,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	7.000.000.000,00	561.255.860,00	8,02	75.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	561.255.860,00	8,02	75.000.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(130.660.176.513,68)	51.895.236.750,85	(39,72)	(22.968.478.566,29)
3	PEMBAYARAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	146.493.435.934,68	33.838.947.039,68	23,10	80.672.196.504,32
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	12.493.435.934,68	22.504.947.039,68	180,13	80.672.196.504,32
3.1.6	Penerimaan Pinjaman Daerah	134.000.000.000,00	11.334.000.000,00	8,46	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.833.259.421,00	12.701.122.846,29	80,22	35.195.474.136,35
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.679.259.421,00	0,00	0,00	19.980.000.000,00
	PEMBAYARAN NETTO	14.154.000.000,00	12.701.122.846,29	89,74	15.215.474.136,35
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN (SILPA)	130.660.176.513,68	21.137.824.193,39	16,16	45.476.722.367,97
		0,00	73.033.060.944,24	0,00	22.508.243.801,68

WALIKOTA MEDAN

td

DZULMI ELDIN S.

**PEMERINTAH KOTA MEDAN****NERACA**

Per 31 December 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	2013	2012
ASET	5.5		
ASET LANCAR	5.5.1	1,395,423,486,325.29	1,140,960,171,355.67
Kas	5.5.1.1	73,288,995,019.72	25,062,069,653.68
Kas di kas daerah	5.5.1.1.1	59,008,116,575.13	12,493,435,934.68
Bank sumut ac 000703-0	5.5.1.1.2	14,454,326,779.93	4,214,040,189.13
Bank sumut ac 19344-0	5.5.1.1.3	44,539,241,658.01	4,812,422,928.76
Bank sumut ac. 18295-0	5.5.1.1.4	14,041,718.70	1,554,231,397.00
Bank sumut ac. 22386-6	5.5.1.1.5	506,418.49	1,912,741,419.79
Kas di Bend. Pengeluaran SKPD	5.5.1.1.6	-	-
Kas di Bend. Penerimaan SKPD	5.5.1.1.7	255,934,075.48	2,075,419,021.00
Kas di Bendahara BLUD RSU Pirngadi	5.5.1.1.8	12,711,215,458.89	8,994,960,907.30
Kas di Bendahara Swakelola BLUD RSU Pirngadi	5.5.1.1.9	1,313,728,910.22	1,102,724,484.70
Kas Lainnya di Bend. Pengeluaran SKPD	5.5.1.1.15	-	23,255,540.00
Kas Lainnya di Bend. BLUD RSU Pirngadi	5.5.1.1.16	-	372,273,766.00
Piutang	5.5.1.2	1,274,386,378,590.72	1,056,666,841,162.32
Piutang Pajak daerah	5.5.1.2.1	300,948,870,595.22	478,480,611,224.28
Piutang Retribusi Daerah	5.5.1.2.2	37,964,200,997.32	11,939,735,995.58
Piutang PAD Lainnya (Deviden PD Pasar)	5.5.1.2.3	405,743,699.50	72,052,380.00
Piutang dana bagi hasil pusat	5.5.1.2.4	-	102,505,740.00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Propinsi	5.5.1.2.5	930,393,776,327.23	562,280,905,904.94
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.2.6	68,308,000.00	184,072,000.00
Beban dibayar di muka	5.5.1.2.7	363,613,295.45	336,295,151.52
Piutang Lain-lain	5.5.1.2.8	4,241,865,676.00	3,270,662,766.00
Persediaan	5.5.1.3	47,748,112,714.85	59,231,260,539.67
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.5.2	275,239,965,460.00	282,416,914,131.53
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	5.5.2.1	1,680,036,374.00	2,911,000,000.00
Investasi Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	273,559,929,086.00	279,505,914,131.53
ASET TETAP	5.5.3	22,995,114,963,711.50	22,610,244,670,381.10
Tanah	5.5.3.1	18,587,731,635,649.00	18,661,444,455,037.00
Peralatan dan Mesin	5.5.3.2	837,290,920,429.72	760,368,681,120.04
Gedung dan Bangunan	5.5.3.3	1,037,594,572,181.05	911,949,523,803.20
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.4	2,712,983,043,505.37	2,429,960,639,975.07
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.5	54,751,557,362.38	48,686,939,412.47
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.3.6	44,634,076,501.67	52,331,131,548.70
Akumulasi Penyusutan	5.5.3.7	(279,870,841,917.74)	(254,496,700,515.37)
ASET LAINNYA	5.5.4	127,937,961,367.87	99,006,818,674.57
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.4.1	26,730,618,522.91	26,730,618,522.91
Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	5.5.4.2	20,260,110,901.50	17,029,826,846.50
Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran	5.5.4.3	390,000,000.00	390,000,000.00
Aset Lain-lain	5.5.4.4	80,557,231,943.46	54,856,373,305.16
JUMLAH ASET		24,793,716,376,864.60	24,132,628,574,542.90

NERACA

Halaman 1

revisi 10/01/2014

URAIAN	REFF	2013	2012
KEWAJIBAN	5.6		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.6.1	229,931,807,369.28	326,502,942,884.71
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.1.1	-	395,529,306.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.6.1.2	22,531,284,350.15	19,834,606,628.06
Pendapatan Diterima Dimuka	5.6.1.3	2,385,490,735.87	80,833,333.33
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Belanja	5.6.1.4	171,838,796,786.00	292,547,885,793.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.6.1.5	33,176,235,497.26	13,644,087,824.32
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.6.2	99,021,381,077.86	106,686,689,932.50
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.2.1	97,386,319,277.86	104,234,097,232.50
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.6.2.2	1,635,061,800.00	2,452,592,700.00
JUMLAH KEWAJIBAN		328,953,188,447.14	433,189,632,817.21
EKUITAS DANA	5.7		
EKUITAS DANA LANCAR	5.7.1	1,165,491,678,956.01	814,457,228,470.96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		73,033,060,944.24	22,508,243,801.68
Cadangan untuk Piutang		1,274,386,378,590.72	1,056,666,841,162.32
Cadangan untuk Persediaan		47,748,112,714.85	59,231,260,539.67
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek		(229,931,807,369.28)	(326,107,413,578.71)
Pendapatan yang Ditangguhkan		255,934,075.48	2,158,296,546.00
BLUD RSU Pirmgadi		95,498,586.00	82,877,525.00
Dinas Pendapatan		-	2,075,419,021.00
Dinas Perindustrian Perdagangan/Dana Bergulir		160,435,489.48	
EKUITAS DANA INVESTASI	5.7.2	23,299,271,509,461.50	22,884,981,713,254.70
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		275,239,965,460.00	282,416,914,131.53
Diinvestasikan dalam Aset Tetap		22,995,114,963,711.50	22,610,244,670,381.10
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)		127,937,961,367.87	99,006,818,674.57
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang		(99,021,381,077.86)	(106,686,689,932.50)
EKUITAS DANA CADANGAN		-	-
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan		-	-
JUMLAH EKUITAS DANA		24,464,763,188,417.50	23,699,438,941,725.70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		24,793,716,376,864.60	24,132,628,574,542.90

WALIKOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2013 dan 2012

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	2013	2012
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Pendapatan Pajak Daerah		881,346,719,012.01	892,674,245,233.74
Hasil Retribusi Daerah		188,459,795,126.50	127,839,652,517.53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9,503,605,764.00	9,780,305,586.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		126,859,589,245.22	117,607,258,270.11
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		174,054,637,586.00	197,098,179,192.00
Dana Alokasi Umum		1,270,244,794,000.00	1,153,789,320,000.00
Dana Alokasi Khusus		62,016,918,000.00	66,298,270,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah		190,770,621,426.00	154,099,451,676.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		363,758,805,000.00	251,397,130,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		9,328,800,000.00	27,620,100,000.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.8.1.1	3,276,344,285,159.73	2,998,203,912,475.38
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Pegawai		1,912,221,528,149.00	1,743,320,808,689.00
Belanja Bunga		4,993,144,103.55	3,340,622,868.18
Belanja Hibah		29,935,455,125.00	38,779,945,450.00
Belanja Bantuan Sosial		742,500,000.00	14,684,300,000.00
Belanja Tidak Terduga		561,255,860.00	75,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan		1,166,264,900.00	1,166,264,900.00
Belanja Barang dan Jasa		644,025,941,486.33	661,376,711,350.49
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.8.1.2	2,593,646,089,623.88	2,462,743,653,257.67
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.8.1	682,698,195,535.85	535,460,259,217.71
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan			
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Belanja Modal Pengadaan Tanah		8,494,139,667.00	22,039,829,012.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat		4,465,190,000.00	22,818,422,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor		6,016,155,000.00	17,760,917,526.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak		930,480,000.00	1,350,323,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air		39,700,000.00	2,864,194,800.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel		733,066,760.00	398,973,500.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan		1,469,976,000.00	1,392,144,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor		9,278,482,648.00	10,707,703,350.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor		5,342,632,581.00	5,165,240,289.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer		9,507,002,325.00	9,764,970,300.00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair		26,312,815,577.00	10,135,626,225.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur		330,243,600.00	913,025,500.00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga		8,639,441,200.00	9,925,675,817.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio		3,100,214,100.00	1,258,333,900.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi		988,472,000.00	2,508,082,500.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur		512,855,000.00	2,369,513,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran		11,310,212,900.00	18,562,513,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium		8,280,012,658.00	2,377,157,900.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan		132,838,689,200.00	126,859,453,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan		8,665,309,884.00	4,619,264,250.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air		140,718,810,546.00	135,484,175,550.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan		22,065,101,000.00	6,981,863,000.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon		718,981,250.00	222,719,625.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan		207,509,235,619.00	135,034,546,963.00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan		1,929,678,550.00	712,407,577.00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian,		390,805,020.00	462,994,200.00
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman		0.00	23,700,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan		335,784,000.00	231,025,000.00
Belanja Modal Pemadam Kebakaran		1,824,150,000.00	168,520,000.00
Belanja Modal Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas		445,570,000.00	0.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga		0.00	90,350,000.00

URAIAN	REFF	2013	2012
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Jalan		6,832,565,700.00	1,172,664,600.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Sekolah		777,186,000.00	4,052,408,400.00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.8.2.2	630,802,958,785.00	558,428,737,784.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	5.8.2	(630,802,958,785.00)	(558,428,737,784.00)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Pinjaman Daerah		11,334,000,000.00	0.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.8.3.2	11,334,000,000.00	0.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0.00	19,980,000,000.00
Pembayaran Pokok Utang		12,701,122,846.29	11,277,773,511.91
Pembayaran Utang Kepada Rekanan/Kontraktor		0.00	3,937,700,624.44
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.8.3.2	12,701,122,846.29	35,195,474,136.35
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	5.8.3	(1,367,122,846.29)	(35,195,474,136.35)
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran			
<i>Arus Kas Masuk</i>			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		270,345,450,701.00	238,450,549,016.00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	5.8.4.1	270,345,450,701.00	238,450,549,016.00
<i>Arus Kas Keluar</i>			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		270,345,450,701.00	238,055,019,710.00
Koreksi SiLPA		3,296,762.00	
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.8.4.2	270,348,747,463.00	238,055,019,710.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5.8.4	(3,296,762.00)	395,529,306.00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		50,524,817,142.56	(57,768,423,396.64)
Saldo Awal Kas (SiLPA)		22,508,243,801.68	80,672,196,504.32
Saldo Akhir Kas		73,033,060,944.24	22,903,773,107.68
Terdiri dari :			
Kas di Kas Daerah		59,008,116,575.13	12,493,435,934.68
Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	0.00
Kas di Bendahara Swadana/BLUD RSU		12,711,215,458.89	8,912,083,382.30
Kas di Bendahara Swakelola/Instalasi farmasi		1,313,728,910.22	1,102,724,484.70
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		-	23,255,540.00
Kas Lainnya di Bendahara Swadana/BLUD RSU		0.00	372,273,766.00
Saldo Akhir Kas (SiLPA + Utang PFK)		73,033,060,944.24	22,903,773,107.68
Kas di Bendahara Penerimaan		160,435,489.48	2,075,419,021.00
Kas di Bendahara Swakelola (pdpt yang ditangguhkan)		95,498,586.00	82,877,525.00
Saldo Akhir Kas	5.8.5	73,288,995,019.72	25,062,069,653.68

WALIKOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2013

BAB VII
PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Medan selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Medan.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2013 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Medan dalam penyampaian laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Medan telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Medan dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

WALIKOTA MEDAN

ttd

DZULMI ELDIN S.